



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Yosephine Sembiring; Duma Megaria Elisabeth

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2018

Disetujui Oktober 2018

Dipublikasikan November 2018

Keywords:

Sistem Akuntansi;

UMKM; Pelaku Usaha;

Toba Samosir; Balige

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penerapan sistem akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah yang bergerak dalam bisnis perdagangan yang dibina oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan sampel sebanyak 36 responden. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penerapan sistem akuntansi, penyiapan laporan keuangan dalam pengendalian usaha, dan mendorong para pelaku UMKM supaya memahami dan menjalankan sistem akuntansi yang baik dan benar dalam proses pembukuan usaha.

PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan terhadapnya agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas daya saing produknya. Pemberdayaan bidang usaha mikro kecil dan menengah menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya, serta keberadaan investasi UMKM melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro di atas selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM, serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, pelaku usaha UMKM dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks. Hal ini terkait dengan adanya berbagai macam transaksi bisnis yang terus berkembang sejalan dengan kegiatan usaha. Terlepas dari semakin kompleksnya kegiatan usaha dan juga transaksi yang beraneka ragam tersebut, maka secara otomatis kegiatan operasional juga semakin beragam pula. Dengan demikian, diperlukan adanya pengelolaan kegiatan usaha sehingga kegiatan operasional dapat terkontrol dengan baik.

Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah berkaitan dengan ketidakpahaman tentang bagaimana sistem akuntansi yang baik dalam penyiapan laporan keuangan untuk pengendalian usaha. Sistem akuntansi terdiri dari berbagai macam prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan, maka sistem akuntansi semakin penting untuk diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif.

Amanah (2013) menganalisis tentang pencatatan akuntansi pada UMKM dengan mengambil populasi dari UMKM yang berada di bawah binaan Dinas Koperindag untuk Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 40 orang responden atau pelaku usaha UMKM diketahui bahwa penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM yang berada di bawah binaan Dinas Koperindag di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang. Mengacu

pada penelitian tersebut, berikut ini penelitian melakukan penelitian penerapan sistem akuntansi dasar pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang usaha dagang binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Toba Samosir.

Secara umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak dalam bidang usaha dagang di Kabupaten Toba Samosir belum dapat membuat laporan kinerja usaha dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini terjadi karena UMKM yang bergerak dalam bidang usaha dagang tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Kebanyakan dari UMKM yang bergerak dalam bidang usaha dagang hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang atau utang. Namun pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja, dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP). Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada usaha kecil dan menengah, pihak perbankan tentu akan merespon positif sehingga memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan bisnis usaha kecil dan menengah yang bergerak

dalam bidang usaha dagang dalam memperoleh bantuan kredit pengembangan usaha. Selain itu UMKM yang bergerak dalam bidang usaha dagang memiliki laporan keuangan yang akurat yang sangat berguna bagi usaha kecil dan menengah untuk mengetahui keberhasilan usaha yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan sistem akuntansi dalam proses kegiatan operasional usaha pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Toba Samosir. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi pemahaman para pelaku usaha terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

LANDASAN TEORI

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berasaskan kekeluargaan, demokrasi Ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berasaskan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi diibaratkan sebagai jantung suatu perusahaan. Tanpa ada sistem akuntansi, perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila sistem akuntansi tidak diterapkan, maka kegiatan operasional tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta kemungkinan terjadi banyak penyelewengan-penyelewengan dalam praktik dan proses bisnis. Karena berperan sangat penting, maka perusahaan harus mulai menerapkan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian – kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya.

Belkaoui (2011: 50) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi - transaksi dan kejadian – kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan kumpulan dari bagian-bagian sistem yang membentuk satu kesatuan, atau dengan kata lain sistem terdiri dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan satu sama lain. Prosedur tersebut merupakan urutan-urutan kegiatan yang harus dilaksanakan, jadi dalam suatu kegiatan perusahaan dapat dicontohkan prosedur tersebut merupakan urutan kegiatan yang harus dilaksanakan mulai dari adanya transaksi sampai bagaimana caranya transaksi tersebut harus dilaporkan.

Sistem akuntansi ini harus diterapkan untuk semua jenis usaha perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa, maupun perusahaan manufaktur, dan juga menurut skala perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, tetapi

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan kondisi perusahaan. Sistem akuntansi dalam pelaksanaan tidak kaku, dalam artian penerapan sistem untuk perusahaan kecil dengan besar semestinya berbeda. Hal ini mempertimbangkan *cost-benefit*-nya. Misal dalam perusahaan besar transaksinya relatif lebih kompleks, sehingga penerapan sistemnya juga lebih kompleks pula.

Sesuai dengan siklus dalam perusahaan, maka sistem itu terdiri dari: sistem akuntansi penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, sistem pembelian dan sistem penjualan. Sistem penerimaan kas ada dua macam, yaitu secara tunai dan kredit. Secara teori ada tiga macam prosedur penerimaan kas, yaitu penerimaan kas dari *over-the-counter sale*, penerimaan kas dari *cash-on-delivery sales* (COD), dan dari *credit card sales*.

Dari uraian tentang prosedur-prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi tersebut maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa akhir dari penyusunan sistem dan prosedur tersebut adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat dalam bentuk laporan keuangan.

Secara umum pengertian laporan keuangan adalah mendasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.1 2015) yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan misalnya informasi keuangan

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Penerapan Sistem Akuntansi Pada UMKM

Sriyana (2010) mengatakan bahwa sektor UMKM merupakan sektor yang penting dan perlu mendapat perhatian. Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan, diantaranya dengan adanya kemudahan dalam akses permodalan, bantuan pembangunan prasarana, pengembangan skala usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses teknologi, dan mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Wulanditya (2011) menjelaskan bahwa dengan segala kemudahan yang ada saat ini, diharapkan para pengusaha UMKM minimal dapat menumbuhkan kesadaran pembukuan. UMKM dapat memandang segi positif yang akan mereka peroleh, yaitu dengan adanya laporan keuangan mereka dapat menilai dan mengevaluasi kinerjanya, mempermudah perolehan bantuan dana dari bank ataupun lembaga kredit lainnya, serta menghindari sanksi atas ketidakpatuhan terhadap aturan pajak.

Kristanto (2011) menyatakan bahwa persepsi pengelola UMKM mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ternyata masih kurang. Hal ini disebabkan karena para pelaku UMKM tidak ada keinginan untuk tahu dan tidak adanya sosialisasi oleh dinas terkait seperti DISPERINDAG untuk mensosialisasikan tentang adanya SAK ETAP untuk UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Balige Kabupaten Toba Samosir terhadap lima puluh pengelola UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam bidang usaha dagang dengan aktiva yang dimiliki lebih dari lima puluh juta rupiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang ada di UMKM. Selain penyebaran kuesioner juga dilakukan wawancara juga dilakukan tanya jawab langsung/wawancara mengenai pengelolaan transaksi keuangan serta prospek implementasi SAK ETAP di Wilayah Kabupaten Toba Samosir

HASIL PENELITIAN

Dari 50 responden yang disurvei, ada 9 responden yang menolak diwawancara dan 5 yang datanya tidak valid karena tidak ingin menyebutkan omzet dan asset yang dimiliki, sehingga jumlah responden yang diperoleh sebanyak 36 responden yang datanya diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang berpendidikan S1 sebesar 22.2%, responden berpendidikan SMA sebesar 52.8%, responden yang berpendidikan SMP sebesar 11.1 %, dan berpendidikan SD sebesar 13.9%. Dengan demikian, sebagian besar responden memiliki pendidikan sampai tingkat SMA.

Dilihat dari lamanya usaha, sebanyak 10 UMKM (27,8%) telah berdiri antara 1-5 tahun, 9 UMKM (25%) sudah berdiri antara 6-10 tahun, sebanyak 5 UMKM (13,9%) telah beroperasi antara 11-15 tahun, dan sisanya telah berdiri lebih dari 26 tahun. Dari 36 responden UMKM, sebagian besar usahanya telah berdiri antara 1-5 tahun.

Memiliki tenaga kerja dengan kemampuan akuntansi sangat penting dalam suatu usaha karena dengan adanya tenaga kerja yang memahami akuntansi maka proses penerapan akuntansi dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini adalah UMKM yang memiliki tenaga kerja dengan kemampuan/keahlian khusus akuntansi adalah 8 UMKM (22.2%) yang berlatar belakang Sarjana, dan pernah mendapatkan pelatihan pembukuan sederhana. Sementara itu, sebanyak 28 UMKM (77.8%) tidak memiliki tenaga kerja dengan kemampuan khusus akuntansi. Hal ini disebabkan karena pemilik UMKM merasa tidak perlu karena sebagian besar masalah keuangan diatur atau dipegang oleh pemilik usaha itu sendiri. Alasan lain yaitu usaha perusahaan belum butuh dan dilihat dari umur usaha yang belum berdiri terlalu lama menjadi alasan pihak UMKM tidak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus akuntansi.

Membedakan pencatatan keuangan usaha dan pencatatan keuangan pribadi dalam menjalankan suatu usaha sangatlah penting. Hal ini dilakukan karena dapat mempermudah pengelola UMKM untuk menganalisis hasil usaha. Mencampur keuangan pribadi dan usaha membuat pengelola usaha tidak dapat memastikan perkembangan usaha secara terperinci. Pengelola usaha tidak bisa dengan pasti menentukan apakah usaha

yang dijalankan benar-benar menghasilkan keuntungan atau sebenarnya dalam kondisi rugi, namun seringkali tertutup dengan pemasukan yang berasal dari keuangan pribadi.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 10 UMKM (27.8%) dalam hal keuangan membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan usaha, dan 26 UMKM (72.2%) tidak membedakan dengan alasan tidak perlu dan semua yang dimiliki adalah harta pribadi dan alasan lain semua kepentingan dianggap sama. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak menerapkan konsep entitas bisnis dalam usahanya.

Pencatatan transaksi merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses akuntansi. Agar dapat melakukan pengakuan, penilaian dan pengukuran setiap pengelola usaha perlu melakukan pencatatan transaksi. Dengan sistem pencatatan yang baik nantinya akan dihasilkan informasi yang benar mengenai kondisi suatu usaha. Pencatatan yang dilakukan UMKM adalah penjualan, pembelian, persediaan, kas masuk, kas keluar, biaya lain-lain dan gaji. Pencatatan penjualan berfungsi untuk mengetahui laba yang dihasilkan dan merupakan bagian dalam laporan laba rugi, pencatatan pembelian dilakukan untuk mengetahui harga jual, persediaan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengontrol ketersediaan barang.

Penelitian ini menemukan bahwa 28 UMKM (77.8%) sudah mencatat transaksi yang terjadi, dan 8 UMKM (22.2%) tidak mencatat dengan alasan tidak perlu dan transaksi yang terjadi cukup diingat-ingat saja.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menemukan bahwa UMKM yang

melakukan pencatatan transaksi penjualan adalah 20 responden (71.4%), transaksi pembelian 20 responden (71.4%), persediaan 18 responden (64.3%), kas masuk 25 responden (89.3%), kas keluar 21 responden (75%), pembayaran gaji 10 responden (35.7%) dan biaya lain-lain (air, telepon, listrik) 15 responden (53.6%).

Pengelola usaha mencatat transaksi penjualan dan pembelian saat terjadinya transaksi. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yang terlewatkan. Transaksi yang paling banyak dicatat adalah kas masuk 25 responden (89.3%), dan kas keluar 21 responden (75%). Kas masuk dan keluar dicatat setiap hari. Pengelola UMKM beranggapan bahwa mereka mencatat kas masuk dan kas keluar karena laba yang ada cukup dapat dilihat dari selisih kas masuk dan kas keluar. Periode pencatatan gaji dan biaya lain-lain (listrik, air) dilakukan setiap bulan.

Jurnal adalah suatu buku atau catatan transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis dari transaksi-transaksi finansial yang jumlah dan keterangannya ringkas di antaranya waktu kejadian, keterangan transaksi serta debit dan kredit. Sumber pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti/dokumen transaksi keuangan. Setiap transaksi dicatat secara berpasangan ke dalam debit dan kredit (*double entry accounting*) dan jumlah debit dan jumlah kredit harus sama.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 25 responden memiliki bukti transaksi, dapat diketahui bahwa 15 responden (60%) membuat jurnal/buku harian dan 10 persen (40%) tidak membuat. Alasan pelaku UMKM tidak melakukan penjumlahan adalah mereka merasa tidak perlu membuat dan tidak bisa membuat.

Kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan pelaku UMKM tentang akuntansi membuat mereka tidak merasa perlu untuk membuat jurnal (buku harian). Semua transaksi baik secara rutin atau tidak merupakan bahan untuk membuat laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi tersebut dengan cara membuat jurnal.

Buku Besar adalah buku yang berisi kumpulan dari semua perkiraan harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan dan beban. Setelah melakukan penjumlahan, proses selanjutnya adalah memposting transaksi ke dalam buku besar (*ledger*), yaitu memindahkan seluruh pos-pos yang ada dalam jurnal ke dalam rekening-rekening di buku besar.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dari 15 responden yang membuat jurnal/buku harian dapat diketahui bahwa 7 responden (46.73%) yang membuat buku besar dan 8 responden (53.3%) tidak membuat dengan alasan tidak perlu dan tidak tahu membuat buku besar. Pengelola UMKM sebagian besar belum memahami cara memposting jurnal ke buku besar dan merasa sulit untuk menerapkannya. Mereka berpikir cukup mengelola keuangan dengan cara mereka sendiri tanpa dipusingkan dengan cara pencatatan yang sulit. Oleh karena itu sebagian besar dari mereka tidak membuat buku besar dalam mengelola usaha mereka.

Neraca saldo berfungsi membuktikan bahwa dalam jumlah debit dan kredit adalah sama di dalam buku besar, serta menyajikan daftar perkiraan beserta saldonya sebagai dasar bagi penyesuaian dan berguna dalam penyusunan laporan keuangan. Prosedur yang dilakukan dalam pembuatan neraca saldo adalah

menjumlah semua pos-pos rekening dalam buku besar, kemudian memindahkan semua pos-pos rekening dalam buku besar ke neraca saldo dan menjumlahkan sisi debit dan kredit dan jumlahnya harus sama.

Ketika ditanyakan apakah responden mengerti istilah neraca saldo, responden yang memiliki jawaban “tidak” paling banyak yaitu 29 responden (80.6%) dan “ya” 7 responden (19.4%). Hal tersebut berarti menggambarkan terbatasnya pengetahuan responden terhadap akuntansi secara menyeluruh.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kegiatan penyusunan laporan keuangan masih dianggap mewah dan belum sebanding dengan kegunaannya. Akibatnya pelaku UMKM tidak mengetahui secara persis berapa pendapatan (kas) yang seharusnya di terima, berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dan berapa yang seharusnya masih tersisa. Permasalahan itu semakin kompleks seiring dengan semakin besarnya kegiatan usaha UMKM. Dengan semakin luasnya ukuran usaha, pelaku UMKM tidak mampu lagi memantau secara langsung kegiatan usaha yang sedang berjalan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan membuat laporan keuangan dan menganalisisnya lebih lanjut.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 15 responden (41.7%) memiliki laporan keuangan, dan 21 responden (58.3%) tidak memiliki dengan alasan tidak perlu

membuat dan tidak bisa membuat laporan keuangan.

Dari 15 UMKM yang memiliki laporan keuangan, laporan keuangan yang dicatat adalah Neraca 5 responden (33.3%), laba rugi 11 responden (73.3%), arus kas 1 responden (6.7%) dan perubahan modal 7 responden (46.7%). Pemikiran pengelola UMKM menganggap bahwa membuat laporan keuangan rumit yang melatarbelakangi mereka merasa tidak perlu membuat laporan keuangan seperti usaha yang sudah sangat besar.

Kendala yang dihadapi oleh pengelola UMKM dalam menerapkan proses akuntansi adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi dalam usaha yang mereka jalankan. Para pengelola UMKM beranggapan bahwa akuntansi merupakan sesuatu yang sulit yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya tertentu. Dari 36 responden hanya 7 responden (19.4%) yang menerapkan proses akuntansi yang lengkap dari proses pencatatan sampai pembuatan laporan keuangan. Keterbatasan ilmu pengetahuan tentang akuntansi mempengaruhi keputusan para pelaku bisnis untuk menerapkan pencatatan transaksi/perhitungan secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi.

Kesulitan yang muncul untuk membuat laporan keuangan adalah karena sebagian besar pelaku usaha tidak menerapkan konsep entitas dalam usahanya. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha sangat penting karena kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kita. Jika kita melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, maka kita dapat mengetahui pendapatan yang kita terima itu dihasilkan dari usaha kita atau dari pendapatan di luar usaha.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 36 responden, yang menerapkan proses akuntansi lengkap yaitu dari proses pencatatan sampai proses pelaporan keuangan sebanyak 7 responden (19.44%), yang melakukan proses akuntansi kurang lengkap adalah 22 responden (61.1%), dan yang tidak menerapkan proses akuntansi ada 7 responden (19.44%). UMKM yang menerapkan akuntansi secara lengkap adalah UMKM yang mulai berkembang. Kesadaran akan kebutuhan akuntansi dirasakan pelaku UMKM ketika usaha semakin berkembang dan transaksi yang terjadi semakin banyak.

UMKM yang menerapkan proses akuntansi kurang lengkap dari 22 responden, yang melakukan pencatatan transaksi ada 21 responden (58.3%), yang memiliki banyak bukti transaksi ada 18 responden (64.3%) dan membuat jurnal ada 8 responden (32%). Alasan pelaku UMKM tidak melakukan proses akuntansi secara lengkap karena belum merasa membutuhkan. Transaksi yang terjadi setiap hari belum terlalu banyak dan tidak sesuai dengan manfaatnya jika menerapkan proses akuntansi secara lengkap. Pelaku UMKM beranggapan asalkan telah melakukan pencatatan dan memiliki bukti transaksi sudah dirasa cukup untuk mengetahui perkembangan usaha. UMKM yang melakukan proses akuntansi sampai dengan penjurnalan beralasan membuat jurnal adalah agar transaksi yang telah dicatat lebih tersusun rapi sesuai dengan waktu (tanggal transaksi) dan keterangan transaksi lebih ringkas sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi.

Dalam pembuatan jurnal, pelaku UMKM merasa sudah dapat membuat laporan keuangan, dan tidak perlu memindahkan ke buku besar dan membuat neraca saldo. Hal ini karena pelaku UMKM merasa memposting ke buku besar dan membuat neraca saldo rumit dan membutuhkan waktu sehingga tidak efektif. Selama menjalankan usaha, pelaku UMKM sudah merasa cukup dengan proses akuntansi yang mereka lakukan. Asalkan ada pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah cukup guna memperoleh informasi tentang laba yang diperoleh dari selisih kas masuk dan kas keluar.

Dari hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran pelaku UMKM menerapkan proses akuntansi dalam usahanya yaitu adanya alasan bahwa usaha yang mereka jalankan merupakan usaha keluarga maka tidak diperlukan proses akuntansi, dana yang digunakan untuk usaha seringkali bercampur dengan dana sendiri, tidak adanya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus akuntansi serta anggapan bahwa akuntansi merupakan hal yang sulit dan rumit dan waktu yang ada sudah tersita untuk pekerjaan, sehingga sulit sekali menyisihkan waktu untuk melakukan proses akuntansi.

Banyak UMKM yang dapat berjalan dan berhasil tanpa laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hanya didasarkan pada intuisi dan kebiasaan yang berasal dari pengalaman. Tujuh UMKM yang tidak melakukan proses akuntansi dalam menjalankan usahanya beranggapan bahwa akuntansi adalah hal yang sulit dan pelaku UMKM merasa tidak perlu membuat pencatatan dan laporan keuangan. Selama ini usaha

tetap berjalan walaupun tidak menerapkan proses akuntansi. Mengandalkan ingatan atas transaksi yang terjadi sudah cukup bagi pelaku UMKM. Waktu dan pengalaman sudah membuktikan bahwa usaha yang dimiliki masih berjalan sampai sekarang.

Namun masalah yang dihadapi adalah pelaku UMKM tidak mengetahui secara persis berapa pendapatan yang seharusnya dimiliki dan bagaimana cara mengalokasikan dana yang ada sekarang. Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui pelaku UMKM dalam menerapkan proses akuntansi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan usahanya. Bagi UMKM yang usahanya sudah berkembang dan transaksi yang terjadi sudah semakin kompleks, maka membutuhkan proses akuntansi yang lengkap untuk kebutuhan manajemen dan bagi usaha yang belum memiliki transaksi yang banyak merasa belum perlu menerapkan proses akuntansi yang lengkap.

Secara umum, akuntansi untuk UMKM tidak berbeda dengan jenis skala usaha lain yaitu membuat informasi keuangan melalui proses akuntansi yang benar. Proses tersebut bisa dibuat secara terperinci maupun secara sederhana. Untuk perusahaan kecil, akuntansi harus disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil tersebut. Transaksi yang tidak terlalu banyak cukup digunakan akuntansi dengan proses yang sederhana, namun laporan keuangan yang disajikan dapat dibuktikan kebenaran dan kewajarannya sampai pada bukti transaksi.

Dalam konteks UMKM, sistem akuntansi yang diterapkan adalah model pembukuan, dimana hanya catatan-

catatan penting yang dicatat secara lengkap seperti buku kas (kas masuk dan kas keluar), buku persediaan, buku pembelian, buku penjualan dan lain-lain. Buku-buku tersebut sebenarnya merupakan pengganti dari nama-nama perkiraan (buku besar) dalam akuntansi biasa. Dengan menggunakan akuntansi yang sederhana, UMKM harus mampu membuat penilaian, pengukuran dan pelaporan atas kejadian/transaksi yang berhubungan dengan usaha. Pengelola harus mampu memisahkan antara kepentingan usaha dengan kepentingan pribadi, sehingga dapat diukur secara jelas kinerja atau perkembangan usahanya.

Pengelola UMKM masih banyak yang belum sadar pentingnya akuntansi dalam perkembangan usaha. Sekecil apapun data keuangan yang dimiliki, harus dicatat dengan baik dan ada pembuktian melalui laporan keuangan. Melihat banyak UMKM yang pembukuannya masih sangat kurang bahkan tidak melakukan pembukuan, maka peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait akan sangat penting bagi UMKM untuk membantu memberikan pelatihan serta memberikan pemahaman tentang bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik.

Seringkali pelaku UMKM mengabaikan perlunya suatu proses akuntansi karena persepsi yang salah bahwa akuntansi hanya untuk perusahaan besar. Berapa arus kas masuk dan keluar setiap hari, berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapakah laba atau rugi yang diperoleh adalah sebagian pertanyaan yang menjadi sulit terjawab dengan benar apabila UMKM tidak mengelola dan membuat laporan keuangan. Pengelola dan pembuatan laporan keuangan,

meskipun sederhana adalah mutlak dilakukan sistem dan proses akuntansi pada UMKM. Sebesar apapun usaha yang dimiliki, akuntansi sangat diperlukan jika pelaku UMKM ingin usahanya berkembang. Sedikit apapun transaksi yang terjadi, sederhana apapun proses akuntansi yang dilakukan, informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi akan memberikan pengaruh yang relevan bagi kelangsungan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data yang telah diolah dan dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan proses akuntansi secara lengkap. Pelaku UMKM menganggap bahwa akuntansi merupakan hal yang sulit yang memerlukan waktu dan biaya tertentu ketika akan menerapkannya. Walaupun sebagian besar pelaku usaha belum memahami proses akuntansi, tanpa disadari sebagian besar pelaku UMKM sudah melakukan tahap awal dalam proses akuntansi yaitu pencatatan transaksi dan memiliki bukti transaksi.

Masih sangat banyak pelaku UMKM yang belum bisa dan merasa belum butuh untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian yang penting karena dapat dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Pada umumnya, UMKM dapat berjalan tanpa mengandalkan informasi keuangan yang disusun secara tertib dan teratur. Banyak UMKM yang dapat berjalan dan berhasil tanpa laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hanya didasarkan pada intuisi dan kebiasaan yang berasal dari pengalaman. Penyusunan laporan keuangan masih dianggap mewah dan belum sebanding dengan kegunaannya.

Akibatnya pelaku UMKM tidak mengetahui secara persis berapa pendapatan (kas) yang seharusnya tersisa, dan bagaimana cara mengalokasikan dana yang ada sekarang. Permasalahan akan semakin kompleks ketika usaha yang dimiliki semakin besar. Pelaku UMKM menjadi tidak mampu lagi memantau secara langsung kegiatan usaha yang sedang berjalan. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat diatasi dengan membuat laporan keuangan.

Tidak banyak pelaku UMKM yang memiliki tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus tentang akuntansi dengan pemahaman SAK-ETAP sebagai panduan akuntansi untuk pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM pengelola keuangan adalah pemilik usaha itu sendiri, sehingga merasa tidak membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus akuntansi.

Sebagian besar pelaku UMKM tidak melakukan pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pelaku UMKM menganggap tidak perlu melakukan pemisahan keuangan karena semua yang diperoleh merupakan harta pribadi dan memiliki kepentingan yang sama. Hal ini mencerminkan bahwa pelaku UMKM belum menerapkan entitas bisnis dalam usahanya padahal pemisahan keuangan pribadi dan usaha sangatlah penting.

Sebaiknya pelaku UMKM menerapkan proses akuntansi dalam usahanya. Walaupun usaha masih dapat berjalan tanpa menerapkan proses akuntansi, namun sangat banyak manfaat yang diperoleh ketika menerapkan akuntansi antara lain dapat mengetahui berapa kas yang dimiliki, berapa persediaan dan pendapatan yang dihasilkan. Bagi pelaku usaha yang telah melakukan pencatatan

transaksi dan memiliki bukti transaksi, sebaiknya juga melakukan penjurnalan dan mempostingnya ke buku besar hal ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kita mengetahui perkembangan usaha yang kita jalankan secara jelas. Pelaku UMKM juga harus memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha agar dapat mengetahui berapa pendapatan yang sebenarnya dihasilkan dari usaha yang dijalankan.

Dari 36 responden sebagian besar memiliki tingkat pendidikan hanya sampai SMA. Hal ini sebenarnya tidak berpengaruh kepada kesadaran pelaku UMKM dalam menerapkan proses akuntansi dalam usahanya. Dengan berjalannya waktu serta pengalaman usaha dan berkembangnya usaha yang dimiliki membuat pelaku UMKM wajib menerapkan akuntansi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain.

Mengikuti pelatihan adalah alternatif yang sangat baik agar pelaku UMKM dapat menerapkan proses akuntansi dalam usahanya. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan lebih terbuka dan mengupayakan adanya kerja sama dengan pihak terkait melalui upaya untuk membantu pengelolaan keuangan agar nantinya usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan pesat.

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga bersama pihak akademisi untuk tidak jemu-jemunya mendorong kegiatan pelatihan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK –ETAP untuk tetap mendukung agar UMKM naik kelas, sehingga dapat menjalankan usaha lebih baik dan maju.

Pentingnya pembukuan buat UMKM adalah bukan sekedar penyajian laporan keuangan saja, tetapi bisa dimanfaatkan

untuk melihat kondisi usaha yang dijalankan untuk memberikan motivasi agar setiap pelaku UMKM dapat lebih meningkatkan usaha nya lagi.

Keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti kesulitan meminta responden untuk memperlihatkan pembukuan yang dimiliki dengan alasan bahwa pembukuan bersifat rahasia, dan ketika wawancara berlangsung responden tetap melakukan pekerjaannya, sehingga cukup menyulitkan peneliti dalam melakukan wawancara.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah sampel dalam penelitian ini relatif kecil sehingga belum didapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian yang diteliti. Objek dalam penelitian ini belum dapat dijadikan pedoman karena ada beberapa keterbatasan situasi dan kondisi serta hanya terbatas dalam Kota Balige, khususnya Kabupaten Toba Samosir. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas objek penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini melalui Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun pelaksanaan 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Amanah, Sari. 2013. Analisis Penerapan Pencatatan Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah Binaan Dinas Koperasi UMKM

Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal
1- 8.

Belkaoui, Ahmed Riahi, 2011.
Accounting Theory Buku I. Edisi
5. Jakarta: Salemba Empat.

Kristanto, E. 2011. Penerapan Standar
Akuntansi Keuangan untuk
Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) pada
UMKM pengerajin Rotan di
Desa Trangan Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo. Skripsi.
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas
Maret: Surakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
tahun 2015.

Sriyana, J. 2010. Strategi Pengembangan
Usaha Kecil dan Menengah
(UKM): Studi Kasus di
Kabupaten Bantul. Simposium
Nasional. Yogyakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Wulanditya, P. 2011. *Kemudahan
Penyajian Pajak Penghasilan
(PPh) bagi Pengusaha UMKM
dengan SAK ETAP*. Pamator.
Volume 4 No. 2.